

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan otonomi daerah membuka peluang yang lebih besar bagi setiap daerah untuk berkembang secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Riswana, 2023). Aset adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau dapat dipertukarkan, yang dimiliki oleh individu, lembaga pemerintah, atau perusahaan. Aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) mencakup berbagai jenis barang yang bernilai ekonomis dan dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti tanah, gedung, kendaraan dinas, serta perlengkapan penunjang lainnya, melalui pemantauan secara berkala meskipun masih terdapat beberapa tantangan, seperti sistem peringatan dini untuk kontrak yang belum sepenuhnya efektif. Peran aset sangat penting dalam menunjang kerja instansi pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Triandita et al., 2022). Manajemen aset daerah diperlukan untuk memastikan bahwa aset tersebut bermanfaat dan dapat mempertahankan kondisinya untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan manajemen aset daerah perlu dikelola dengan baik agar dapat berfungsi sebagai modal dasar bagi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan kemajuan wilayahnya. Untuk itu, dibutuhkan landasan hukum yang jelas guna memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan sesuai prosedur yang tepat dan benar (Hadiyanti & Nahar, 2018).

Barang Milik Daerah (BMD) adalah aset penting yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan serta pemberian layanan kepada masyarakat (Zulfan Heri et al., 2022). Barang milik daerah (BMD) merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung terwujudnya otonomi daerah, pengelolaan barang milik daerah (BMD) harus optimal sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dan dikelola secara efisien dan efektif sangat penting bagi kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan serta penyediaan layanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) juga merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah, sehingga pengelolaannya harus efisien. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan sumber daya yang dapat memberikan nilai tambah dan pendapatan bagi pemerintah daerah apabila dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, dalam proses pemanfaatannya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti jenis pemanfaatan yang sesuai (misalnya sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna), potensi ekonomi aset, serta kesesuaian dengan kebutuhan dan kepentingan publik. Agar pemanfaatan BMD dapat berjalan secara maksimal, diperlukan dasar hukum yang kuat dalam bentuk peraturan daerah guna mendukung pengelolaan aset yang efisien dan efektif, serta menjamin

adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya (Zulfan Heri et al., 2022).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset milik daerah. Aset daerah memiliki arti penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal memegang peran utama dalam menjamin bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan secara optimal guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset yang dikelola meliputi tanah, bangunan, kendaraan dinas dan berbagai peralatan lainnya yang digunakan untuk kepentingan daerah.

Meskipun pengelolaan barang milik daerah (BMD) telah diatur dalam regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 dan Permendagri No. 19 Tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal, tidak dicatat secara akurat atau tidak dipantau secara memadai. Pemanfaatan aset oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan aset daerah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Efisiensi pengelolaan aset menjadi sangat penting karena aset yang tidak dikelola dengan baik malah dapat menjadi beban pemeliharaan, berpotensi dikuasi pihak lain secara ilegal, serta hilangnya potensi pendapatan daerah. (Rumbino & Nugroho, 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dengan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMANFAATAN ASET BARANG MILIK DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN TEGAL”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, terdapat permasalahan yang perlu dianalisis dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan aset Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi akademik dalam pemanfaatan aset daerah.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemanfaatan asset agar dikelola secara lebih efektif dan efisien.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Untuk memberi ilmu yang bermanfaat bagi pembaca agar bisa dijadikan referensi akademik bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa dalam menyelesaikan tugas laporannya.

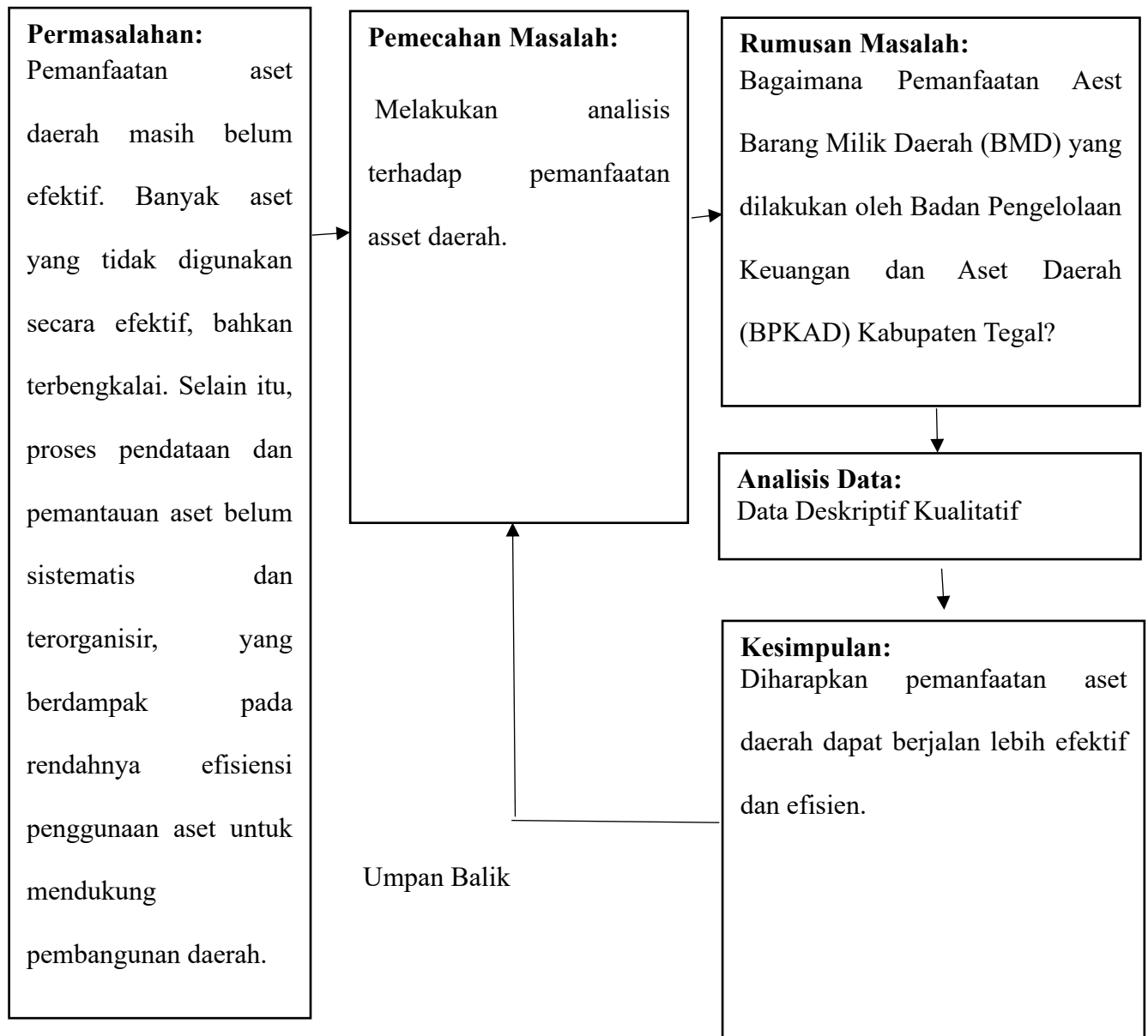
1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang bertujuan untuk memusatkan pembahasan agar lebih terarah, yaitu:

1. Jenis pemanfaatan aset yang dianalisis hanya pada bentuk-bentuk resmi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, serta bentuk lain yang diatur dalam regulasi tersebut.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada tahun 2024, sesuai dengan ketersediaan data dan relevansi waktu penelitian.
3. Penelitian ini hanya membahas pemanfaatan aset Barang Milik Daerah (BMD) seperti sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan bangun guna serah (BGS). Sehingga tidak mencakup pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, atau penilaian asset.

1.6 Kerangka Berfikir

Barang Milik Daerah (BMD) memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta penyediaan layanan kepada masyarakat. Meski demikian, dalam praktiknya pemanfaatan aset daerah masih menemui berbagai kendala, seperti pemanfaatan yang belum maksimal, lemahnya sistem pengawasan, serta belum tersusunnya strategi pemanfaatan yang matang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan tersebut dan menyusun strategi yang tepat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.



Gambar 1 Kerangka Berfikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA). Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang mendasari penulisan penelitian. Landasan teori ini digunakan sebagai landasan

berpikir atau acuan melakukan penelitian. Teori-teori yang mendukung atau mendasari dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan Alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain Kartu Konsultasi dan Spesifikasi teknis serta data-data

lain yang diperlukan. Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.